

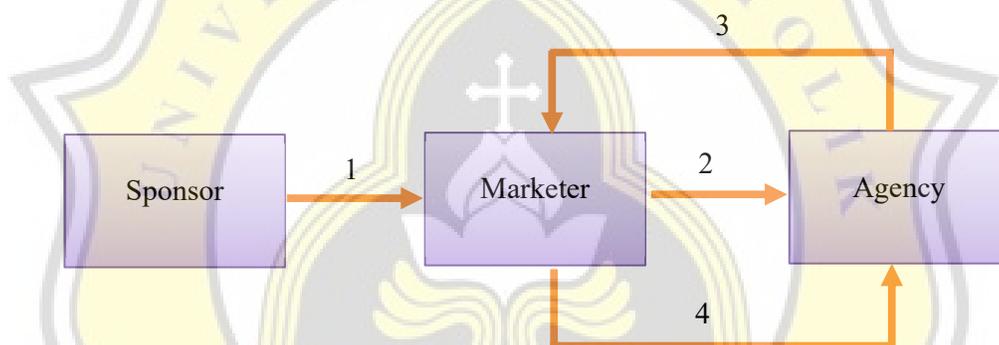
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

PT Arni Family adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang berlokasi di Jalan Kertanegara No.20A, Langensari Rt.02/Rw.04, Ungaran Barat. PT Arni Family sendiri dalam operasionalnya terbagi menjadi 4 cabang divisi yang pertama ada cabang divisi negara Taiwan, cabang divisi negara Hongkong, cabang divisi negara Singapura dan yang terakhir adalah cabang divisi negara Malaysia. Berdasarkan data di lapangan cabang divisi yang paling banyak berkontribusi dalam hal pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan cabang divisi negara dari negara Taiwan dan Singapura. Sebagai salah satu perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia swasta yang besar di Jawa Tengah PT Arni Family memiliki visi dan misi untuk mewujudkan impian dan keinginan dalam meraih sukses Bersama PT Arni Family, meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat di daerah, meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai bidang keahlian dan keterampilan dan ikut serta dalam menumbuh kembangkan perekonomian nasional. Selain sebagai perusahaan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia swasta PT Arni Family juga menyediakan sarana Balai Latihan Kerja (BLK) yang di khususkan untuk melatih para PMI yang mendaftar di PT Arni Family sebagai bagian dari prosesnya dalam penempatannya untuk berkerja di negara tujuan.

Dalam menjalankan operasionalnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia swasta PT Arni Family sendiri memiliki mitra yang berada di beberapa negara seperti Taiwan, Singapura, Hongkong dan Malaysia. Para mitra tersebut di sebut oleh para karyawan dan staff dari PT Arni Family dengan sebutan *Agency* yang merupakan suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dari negara asalnya dan yang berkerja dengan perusahaan penempatan tenaga kerja dari negara penyuplai tenaga kerja. Untuk mendapatkan PMI sendiri PT Arni Family memiliki pegawai lapangan yang disebut sebagai *Sponsor* yang memiliki tugas untuk mencari CPMI yang berkompeten di

berbagai wilayah dan yang berminat untuk merintis karir di negara lain. Selain melalui *Sponsor* PT Arni Family juga melakukan pemasaran terkait pencarian CPMI yang berkompeten melalui media sosial diantaranya melalui *Facebook* yang dimana banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan *Platform Digital Media Sosial* tersebut. Selain melakukan promosi melalui *Sponsor* dan *Platform digital Media Sosial Facebook* PT Arni Family juga melakukan promosi menggunakan media seperti poster, flyer dan baliho di beberapa titik yang jadi pusat CPMI yang berkompeten. Untuk alur kerja dalam proses rekrutmen dan seleksi CPMI sendiri di PT Arni Family sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Alur kerja dalam proses Rekrutmen dan Seleksi CPMI pada PT. Arni Family

Penjelasan alur kerja dalam proses rekrutmen dan seleksi CPMI pada PT Arni Family sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya :

1. Sponsor mencari CPMI yang berkompeten dan memiliki niat untuk berkarir di negara tujuan yang di tangani oleh PT Arni Family, setelah mendapatkan CPMI tersebut Sponsor mengarahkan CPMI ke kantor cabang maupun pusat PT Arni Family untuk di proses dan ketika sudah berada di PT Arni Family CPMI akan berurusan dengan Marketer dari divisi negara yang menjadi negara tujuan CPMI.
2. Marketer mengolah semua persyaratan yang harus di lengkapi oleh CPMI setelah semua data yang di butuhkan terlengkapi dan terverifikasi baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah daerah setempat bahwa data tersebut valid maka CPMI

akan di pasarkan oleh marketer kepada Agency, disini Agency adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang bertempat di negara asing.

3. Setelah Agency memasarkan CPMI tersebut dan CPMI telah mendapatkan majikan selanjutnya Agency akan mengontak kepada marketer terkait dengan Job Spec dan Job Desc yang diberikan majikan kepada CPMI serta pemberian Perjanjian Kerja kepada ketiga pihak antara CPMI, PT sebagai perantara CPMI kepada Majikan dan Agency sebagai perantara antara Majikan dengan CPMI. Selain memberikan hal tersebut agency juga memberikan detail tentang perkerjaan kepada CPMI biasanya dilakukan melalui video call sekalian melihat kemampuan berbahasa asing dari CPMI tersebut.

4. Marketer melanjutkan proses dari CPMI tersebut seperti kelengkapan persyaratan akhir hingga akhirnya CPMI siap untuk di berangkatkan dan akhirnya di berangkatkan ke negara tujuan untuk berkerja.

4.2 Karakteristik Informan

Informan dipilih sesuai dengan tema penelitian dan rumusan masalah, maka dari itu untuk Informan kali ini dibagi menjadi dua Informan. Informan pertama *R1*, adalah Ibu Anita Suciati yang menjabat sebagai Kepala Marketer Divisi Negara Taiwan di PT. Arni Family. Narasumber kedua *R2*, adalah Ibu Ika yang menjabat sebagai Kepala Marketer Divisi Negara Singapura. Dan ada beberapa Informan tambahan sebagai pendukung adalah Ibu Dhani Susilowati yang menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Arni Family dan Bapak Andri yang menjabat sebagai Administrasi pada PT. Arni Family.

4.3 Pendapat marketer negara Taiwan dan Singapura mengenai kebijakan *Zero Cost*

Berdasarkan pendapat marketer dalam menjawab pertanyaan nomor pertama dan kedua yang ada di lampiran, untuk negara Taiwan dan Singapura kebijakan *Zero Cost* merupakan kebijakan yang sangat bagus untuk sekarang dan kedepannya, dan dalam sudut pandang sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PJKIS) merupakan kebijakan yang sangat mendukung. Dikatakan sangat mendukung karena dengan disahkannya kebijakan tersebut maka

akan banyak menggusur para calo yang bermain di belakang PJTKIS sebagai perusahaan jasa penempatan TKI secara legal, yang akhirnya akan banyak CPMI yang berproses secara legal dengan PJTKI/S. Akan tetapi kebijakan *Zero Cost* tidak bisa di terima oleh semua organisasi yang ada di dalam proses rekrutmen dan seleksi CPMI. Karena kenyataannya banyak pihak yang memiliki peran yang sangat krusial yang merasa belum siap dengan kebijakan *Zero Cost* tersebut yaitu Pemerintah Daerah. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah adalah pada hal membiayai pelatihan dan sertifikasi CPMI dari daerah asalnya. Pihak selanjutnya yang menolak dari kebijakan *Zero Cost* tersebut adalah para majikan dari negara tujuan yang tentunya juga memahami terkait kebijakan *Zero Cost*. Perlu diketahui bahwa para majikan ini merupakan majikan-majikan yang memerlukan tenaga kerja migran untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, bukan majikan yang memiliki sebuah perusahaan yang ingin mendatangkan ekspatriat yang memang ahli pada bidangnya. Dengan biaya untuk merekrut tenaga kerja Indonesia yang terlampau tinggi ± NT\$45.000 yang membuat para majikan dari negara asal memilih untuk mendatangkan tenaga kerja dari negara penyuplai tenaga kerja lain.

Berdasarkan pendapat marketer dalam menjawab pertanyaan nomor tiga yang ada di lampiran, kurangnya minat majikan akan tenaga kerja asal Indonesia akibat dari kebijakan *Zero Cost* terkait banyaknya biaya yang perlu di keluarkan untuk mendatangkan pekerja migran asal negara Indonesia tersebut membuat PT. Arni Family sebagai PJTKI/S melakukan penangguhan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya untuk melakukan proses penempatan sebagai Pekerja Migran Indonesia di PT. Arni Family. Penangguhan tersebut terlarat belakangi karena banyak Pemerintah Daerah yang masih belum siap untuk membiayai biaya pelatihan dan uji sertifikasi bagi masyarakat di daerahnya yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia dan tidak adanya majikan yang ingin mendatangkan pekerja migran dari negara Indonesia karena mahalnya biaya yang perlu di keluarkan hanya untuk mendatangkan pekerja migran yang berasal dari Indonesia. Lalu upaya yang di lakukan oleh PT. Arni Family adalah untuk menanggukhan CPMI ID baru dan hanya memproses CPMI ID lama. CPMI ID lama maksudnya adalah CPMI yang sudah terdaftar sebagai PMI yang berproses dengan PJTKIS PT.

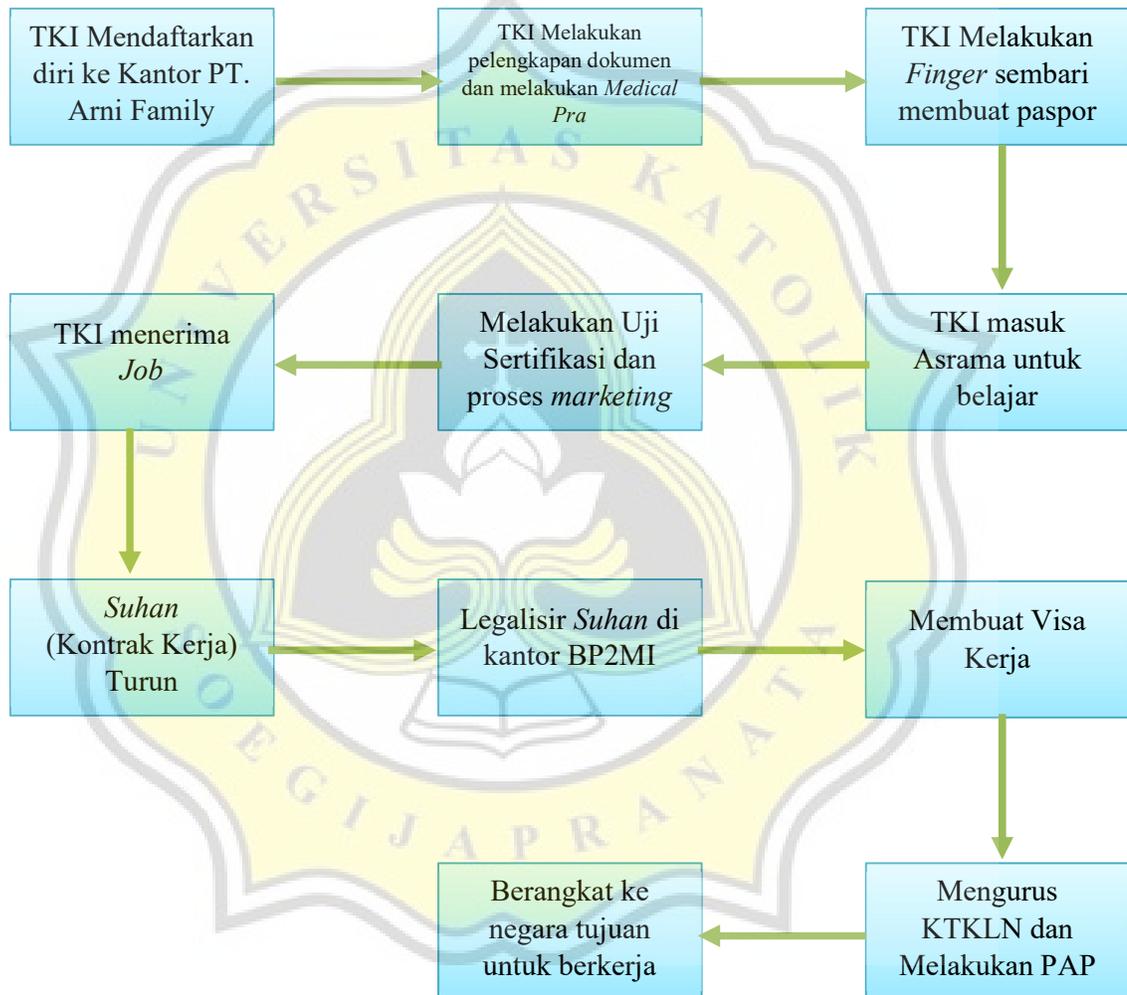
Arni Family dan sudah masuk ke dalam asrama yang disediakan oleh PT. Arni Family sebelum kebijakan *Zero Cost* ditetapkan, sedangkan CPMI ID baru adalah CPMI yang terdaftar sebagai PMI yang berproses dengan PJTKIS PT. Arni Family sesudah kebijakan *Zero Cost* disahkan. Jenis pekerjaan yang ter-cover oleh kebijakan *Zero Cost* sendiri terbagi menjadi 10 pekerjaan yaitu pengurus rumah tangga, pengasuh bayi/balita, juru masak, pengasuh lansia, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja perkebunan, awak kapal perikanan migran dan semua jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan yang sama seperti semua jenis pekerjaan yang sudah disebutkan untuk lebih detailnya terdapat pada tabel jenis jabatan yang dibebaskan biaya penempatan pekerja migran Indonesia yang berada di lampiran. CPMI sendiri bisa berproses tanpa kebijakan *Zero Cost* dengan catatan bahwa pekerjaan yang diambil bukan pekerjaan yang di-cover oleh kebijakan *Zero Cost*. CPMI juga bisa menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh marketer jika menyukai pekerjaan tersebut dan juga bisa menolak apabila CPMI merasa tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Dampak dari kebijakan *Zero Cost* sendiri dirasakan langsung oleh marketer baik dari divisi negara Taiwan dan negara Singapura. Tercatat sebelum pandemic dan kebijakan *Zero Cost* di berlakukan divisi negara Taiwan dapat memberangkatkan PMI per tahunnya sebanyak 1600 PMI, sedangkan setelah kebijakan *Zero Cost* di berlakukan belum ada PMI baru yang yang diproses oleh PT. Arni Family dapat dikatakan bahwa pemberangkatan setelah kebijakan *Zero Cost* di berlakukan sebanyak 0 PMI baru dan 200 PMI ID lama. Untuk negara Singapura sendiri dapat memberangkatkan PMI per tahunnya sebanyak 500 PMI, sedangkan setelah kebijakan *Zero Cost* di berlakukan divisi negara Singapura memberangkatkan 0 PMI ID baru dan 58 PMI ID lama.

Berdasarkan pendapat Marketer negara Taiwan dan marketer negara Singapura dalam menjawab pertanyaan nomor enam yang terdapat di lampiran, marketer berharap agar kebijakan *Zero Cost* dapat diulas kembali oleh pemerintah dan BP2MI sebagai badan organisasi yang berada di bawah petunjuk pemerintah pusat untuk bersosialisasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi Pekerja Migran Indonesia, karena banyak negara tujuan yang

menolak kebijakan *Zero Cost* yang berimbas pada tidak ada PMI ID baru yang berangkat berkerja ke negara tujuan. Tujuan dari mengulas kembali kebijakan *Zero Cost* adalah agar terdapat *win-win solution* dari permasalahan mengenai tidak berminat majikan dari negara tujuan untuk merekrut pekerja migran dari Indonesia karena mahalnya biaya kedatangan pekerja migran ke tempat majikan dan tidak siapnya pemerintah daerah dalam menanggung beban biaya pelatihan kerja dan uji sertifikasi profesi. Diharapkan dengan mengulas kembali dengan mengajak semua pihak yang terlibat seperti Pemerintah Daerah Negara Indonesia, Pemerintah Pusat Negara Indonesia, Pemerintah Negara Tujuan, PJTKI/S (sebagai perwakilan dari CPMI) dan Agency (sebagai perwakilan dari majikan dari negara tujuan) dapat membuat proses rekrutmen dan seleksi (proses penempatan) CPMI bisa berjalan lagi untuk CPMI ID baru dan apa yang diharapkan oleh BP2MI dan pemerintah pusat dalam mengurangi CPMI ilegal dan memberikan solusi terkait CPMI yang tidak mempunyai modal awal untuk berkerja di luar negeri dapat dijalankan dengan lancar tanpa kendala.

4.4 Proses rekrutmen dan seleksi CPMI setelah kebijakan *Zero Cost*

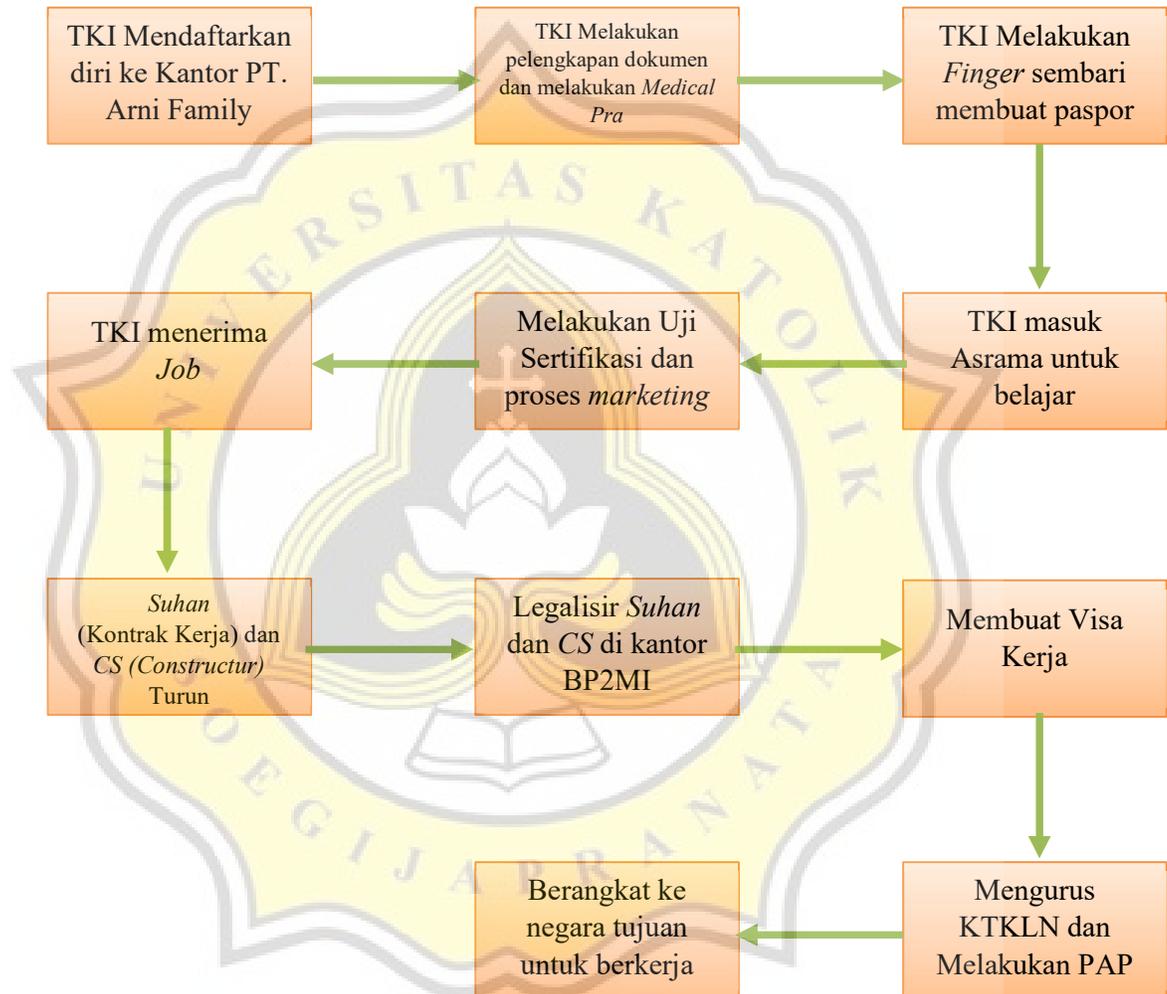
Berdasarkan tanggapan informan yaitu kepala marketer negara Taiwan dan kepala marketer negara Singapura untuk menjawab pertanyaan nomor delapan mengenai alur rekrutmen dan seleksi CPMI sesudah kebijakan *Zero Cost* diberlakukan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Alur proses rekrutmen dan seleksi sebelum kebijakan *Zero Cost* CPMI pada PT. Arni Family

Diatas merupakan gambar proses rekrutmen dan seleksi CPMI sebelum kebijakan *Zero Cost* ditetapkan oleh pemerintah melalui BP2MI. Dimana ada perbedaan

dalam proses rekrutmen dan seleksi CPMI antara sebelum dan sesudah ditetapkannya kebijakan *Zero Cost*. Selanjutnya terdapat gambar proses rekrutmen dan seleksi CPMI setelah kebijakan *Zero Cost* ditetapkan menurut pendapat marketer pada negara Taiwan dan Singapura dalam menjawab pertanyaan nomor delapan, sebagai berikut:



Gambar 4.3 Alur Proses Rekrutmen dan Seleksi CPMI setelah kebijakan Zero Cost pada PT. Arni Family

Pada alur rekrutmen dan seleksi PMI diawali dengan masyarakat yang mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri dengan proses penempatan melalui PJTKIS PT. Arni Family melalui poster, spanduk atau baliho maupun melalui petugas lapangan atau yang disebut dengan *Sponsor*. Pada

proses menawarkan perkerjaan biasanya sponsor memberitahukan juga tentang perkerjaan apa yang akan di lakukan oleh Pekerja Migran Indonesia seperti menjadi Pengurus rumah tangga, pengasuh bayi/balita, juru masak, pengasuh lansia, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja perkebunan, awak kapal perikanan migran dan perkerjaan kasar lainnya. Selanjutnya jika masyarakat berminat untuk berkerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia masyarakat akan mendatangi kantor PJTKI/S pada kasus ini CPMI mendatangi baik kantor cabang maupun kantor pusat PJTKIS PT. Arni Family. Setelah CPMI mendatangi kantor cabang atau pusat PT. Arni Family nantinya CPMI akan di seleksi oleh marketer divisi negara tujuan yang dipilih oleh CPMI. Untuk berkerja di negara Taiwan CPMI di haruskan mempunyai spesifikasi sebagai berikut minimal berumur 20 tahun dan tidak ada batasan usia selama majikan menghendaknya, lalu untuk tinggi badan minimal 150 cm, dan berat badan tidak boleh overweight (>100 kg). Sedangkan untuk berkerja di negara Singapura CPMI di haruskan untuk mempunyai spesifikasi sebagai berikut minimal berusia 23 tahun dan maksimal berusia 35 tahun (boleh lebih dari 35 tahun jika pernah berkerja sebagai PMI di Singapura), tinggi badan minimal 155 cm, dan berat badan tidak boleh overweight (>100 kg). Setelah lolos dari seleksi awal oleh marketer CPMI diwajibkan untuk membawa semua persyaratan awal yang di butuhkan mulai dari surat-surat seperti Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Nikah hingga surat ijin orang tua atau pasangan (suami atau istri), surat ijin kelurahan dan hasil *medical pra* dengan catatan dinyatakan *fit to work*.

Setelah berhasil mengumpulkan semua persyaratan tersebut selanjutnya CPMI melakukan pembuatan ID dan melakukan *finger online* untuk masuk kedalam database pemerintahan dan perusahaan sebagai Pekerja Migran Indonesia yang melakukan proses rekrutmen dan seleksi dari PT. Arni Family. Selanjutnya setelah *finger* selesai dan ID PMI selesai di buat CPMI diwajibkan untuk masuk ke asrama yang telah di sediakan oleh PT. Arni Family untuk belajar di BLK yang telah di sediakan juga oleh PT. Arni Family untuk belajar mengenai adat istiadat di negara tujuan, sopan santun di negara tujuan, hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di negara tujuan, bahasa yang digunakan di negara tujuan dan

pembelajaran mengenai pekerjaan yang dikerjakan di negara tujuan. Selama CPMI belajar di asrama marketer melakukan tugasnya untuk marketing CPMI tersebut kepada *Agency* atau mitra usaha di negara tujuan CPMI untuk di carikan majikan atau pekerjaan. Setelah CPMI dirasa dapat cukup untuk memahami hal-hal yang telah di ajarkan oleh BLK CPMI di haruskan untuk melakukan ujian sertifikasi yang diawasi langsung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, nantinya sertifikasi tersebut menjadi bekal atau salah satu syarat yang di berikan oleh *Agency* untuk mencarikan majikan bagi CPMI.

Setelah uji sertifikasi selesai di lakukan CPMI selanjutnya melakukan pembuatan paspor di kantor migrasi daerah PJTKIS berada. Selanjutnya CPMI menunggu mendapatkan majikan sambil tetap belajar di BLK. Setelah CPMI mendapatkan majikan yang berminat, CPMI akan di panggil oleh marketer untuk melakukan interview dengan *Agency* dari negara tujuan terkait perjanjian kerja (suhan). Ketika perjanjian kerja dan *constructor* (surat perjanjian mengenai uang yang di keluarkan oleh CPMI selama berproses untuk berkerja di negara tujuan dan pendapatan yang di dapatkan oleh CPMI selama berkerja di negara tujuan) dapat di sepakati oleh majikan dan CPMI maka perjanjian kerja akan di legalisir di kantor BP2MI di daerah asal PJTKIS berada. Selanjutnya setelah melakukan legalisir perjanjian kerja CPMI melakukan pembuatan visa kerja. Setelah visa kerja jadi CPMI melakukan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) yang di lakukan di kantor pusat BP2MI yang berada di Jakarta. PAP sendiri merupakan acara yang berisi tentang sosialisasi terkait berkerja di negara tujuan diantaranya termasuk adat istiadat, hukum yang berlaku, bagaimana jika ada masalah, bagaimana jika terkena masalah di negara tujuan semuanya di jelaskan pada saat PAP oleh BP2MI kepada CPMI. Setelah melakukan PAP CPMI membuat KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri) yaitu kartu identitas bahwa orang tersebut adalah pekerja migran yang terdaftar pada system pemerintahan negara asal dan negara tujuan dan KTKLN juga berlaku sebagai tanda pengenal di negara tujuan. Setelah itu marketer dan *Agency* melakukan penjadwalan terkait kapan CPMI diberangkatkan dari negara asal ke negara tujuan untuk berkerja.

Ada perbedaan dalam proses penempatan TKI ke negara tujuan antara sebelum dan sesudah disahkannya kebijakan *Zero Cost*. Selain perbedaan sebelum kebijakan *Zero Cost* disahkan tidak ada *constructor* (surat perjanjian mengenai pengeluaran yang di keluarkan oleh CPMI selama berproses untuk berkerja di negara tujuan dan pendapatan yang di dapatkan oleh CPMI selama berkerja di negara tujuan) sedangkan setelah kebijakan *Zero Cost* ada *constructor* dan harus di legalisir juga di kantor BP2MI ada perbedaan lain yang dapat ditemukan pada bagian administrasi proses rekrutmen dan seleksi CPMI setelah kebijakan *Zero Cost* diberlakukan ketika membaca KEPKA Nomor 214 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Biaya Penempatan yang sudah di berikan di lampiran berupa tabel. Perbedaannya adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Perbedaan administrasi sebelum dan sesudah *Zero Cost*

No.	Tahapan	Sebelum <i>Zero Cost</i>	Sesudah <i>Zero Cost</i>
1.	Rekrutmen	Biaya transportasi dari daerah asal CPMI ke PJTKI/S di tanggung sendiri oleh CPMI	Biaya transportasi dari daerah asal CPMI ke PJTKI/S di tanggung oleh majikan.
2.	Pembuatan ID dan <i>Medical Pra</i>	<i>Medical Pra</i> biaya di tanggung sendiri oleh CPMI	<i>Medical Pra</i> biaya di tanggung oleh majikan
3.	Membuat Paspor	Biaya ditanggung sendiri oleh CPMI	Pembuatan paspor baru (belum pernah buat paspor sebelumnya) ditanggung oleh pemerintah, sedangkan perpanjang paspor biaya di tanggung oleh majikan.
4.	BLK dan asrama	Semua biaya ditanggung sendiri oleh CPMI.	Biaya BLK di tanggung oleh pemerintah daerah menggugurkan fungsi dana pendidikan sedangkan biaya sehari-hari dan

			biaya semasa asrama di tanggung oleh majikan.
5.	Uji Sertifikasi	Biaya di tanggung sendiri oleh CPMI.	Biaya di tanggung oleh pemerintah daerah melalui fungsi dana pendidikan.
6.	Visa Kerja	Biaya di tanggung sendiri oleh CPMI.	Biaya di tanggung oleh majikan.
7.	Biaya karantina di negara asal dan di negara tujuan	Semua biaya baik karantina di negara asal dan karantina di negara tujuan di tanggung oleh CPMI	Semua biaya karantina baik di negara asal maupun di negara tujuan di tanggung oleh majikan.
8.	Berangkat ke negara tujuan	Biaya transportasi di tanggung sendiri oleh CPMI.	Biaya transportasi di tanggung oleh majikan.

Pada tabel diatas dijelaskan perbedaan proses rekrutmen dan seleksi CPMI antara sebelum dan sesudah kebijakan *Zero Cost* di sahkan dalam segi administrasi, terlihat banyak aspek yang mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah disahkannya kebijakan *Zero Cost*. Terlihat kebijakan *Zero Cost* sangat berdampak positif baik bagi PJTKI/S maupun bagi CPMI sendiri karena biaya yang di keluarkan oleh CPMI di tanggung semuanya baik oleh pemerintah daerah maupun majikan. Jika kebijakan tersebut benar-benar terealisasikan maka akan sangat mengangkat pertumbuhan devisa negara dan akan banyak juga masyarakat yang mau berkerja ke luar negeri. Namun dengan beban biaya sebanyak itu di tanggihkan kepada majikan dimana majikan tidak pastinya orang yang berkecukupan dalam segi ekonomi, atau yang hanya mampu untuk membayarkan gaji saja kepada tenaga kerja pastinya akan sangat keberatan dan akhirnya memilih alternatif lain untuk memperkerjakan tenaga kerja dari negara penyuplai tenaga kerja lainnya. Akibatnya kebijakan *Zero Cost* tersebut belum bisa terealisasikan.